PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA TAHUN 2022
(Studi Kasus Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh :

TEGAS ADLI ALAN
2016021057

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA TAHUN 2022 (Studi Kasus Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

TEGAS ADLI ALAN

Program *SDGs* desa merupakan program yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM pada tahun 2022 khususunya di Desa Margosari sudah dapat dikatakan terlaksana, sedangkan di Desa Margototo belum dapat dikatakan terlaksana dikarenakan pada tahun 2022 Desa Margosari sudah terdapat skor capaian *SDGs* Desa, sedangkan Desa Margototo tidak terdapat skor capaian *SDGs* Desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa Margosari dan Desa Margototo dalam meningkatkan IPM di tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada perangkat desa, bidan desa, dan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Soren C.Winter (dalam Mustari, 2015) dengan indikator perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor (aparat/Birokrat) tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari ketiga indikator dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM pada tahun 2022 khususnya di Desa Margosari dan Desa Margototo sudah terlaksana, dimana kedua desa baik Desa Margototo maupun Desa Margosari memiliki keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM pada tahun 2022.

Kata kunci: SDGs Desa, IPM, Pembangunan Desa. Implementasi Kebijakan Publik

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT BASED ON VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN 2022 (Case Study of Margosari Village and Margototo Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency)

By

TEGAS ADLI ALAN

The Village SDGs program is a program that was implemented in Indonesia in 2020, referring to Permendes PDTT Number 13 of 2020 concerning the Priority Use of Village Funds in 2021 and Permendesa PDTT Number 21 of 2020 concerning the General Guidelines for Village Development and Village Community Empowerment. The implementation of village development based on SDGs Desa in increasing the Human Development Index (HDI) in 2022, especially in Margosari Village, can be said to have been implemented, while in Margototo Village it cannot be said to have been implemented because in 2022 Margosari Village already had an Village SDGs achievement score, while Margototo Village did not have an Village SDGs achievement score. Therefore, this study aims to determine how the implementation of village development based on Village SDGs in Margosari and Margototo Villages in increasing the HDI in 2022. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach, and data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. Interviews were conducted with village officials, village midwives, and villagers.This study uses the theory of public policy implementation according to Soren C. Winter (in Mustari, 2015) with indicators of inter-organizational relationship behavior, behavior of implementors (apparatus/bureaucrats) at the lower level, and behavior of target groups. The results of the study show that based on the three indicators in the implementation of village development based on the Village SDGs in increasing the HDI in 2022, especially in Margosari and Margototo Villages, it has been implemented, where both Margototo Village and Margosari Village have successes and weaknesses in the implementation of village development based on the Village SDGs in increasing the HDI in 2022

Keywords: Village SDGs, HDI, Village Development, Public Policy Implementation

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA TAHUN 2022
(Studi Kasus Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

TEGAS ADLI ALAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA TAHUN 2022** (Studi Kasus Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)
Nama Mahasiswa	:	Tegas Adli Alan
Nomor Induk Mahasiswa	:	**2016021057**
Program Studi	:	**Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	:	**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.	**Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP.**
NIP. 198106012010121003	NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.** .....

Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP.** .....

Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Juni 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan

Tegas Adli Alan
NPM. 2016021057

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tegas Adli Alan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 2002 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Alandes dan Ibu Herlasti Ningrum.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK APIK pada tahun ajaran 2007-2008, dilanjutkan di SDIKT 1 Robbi Rodhiya pada tahun ajaran 2008-2014. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPIT Ar-Raihan pada tahun ajaran 2014-2017. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Kebangsaan pada tahun 2017-2020.

Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2020. Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik dalam mengasah *skill* diri penulis. Penulis pernah menjadi anggota HMJ Ilmu pemerintahan Biro 4 pada tahun 2022. Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Teba Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Kemudian, penulis ikut serta melaksanakan program penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP Unila selama 6 bulan di Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya “jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu”
(QS. Yasin :82)

“Semua akan indah pada waktunya”

(Tegas Adli Alan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirobbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya Tulis ini khusus saya persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta
Alandes dan Herlasti Ningrum

Serta Kakakku dan Adikku Terkasih
Kharisty Aulia Alan dan Aura Mufidah Alan

Terima kasih atas semua dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang tiada hentinya, semoga kelak apa yang telah diberikan dapat menghantarkan Penulis menuju gerbang kesuksesan.

Terima kasih untuk keluarga Besar **"Jurusan Ilmu Pemerintahan"** dan Almamater tercinta **"Universitas Lampung"**

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Pembangunan Desa Bebasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2022 (Studi Komparasi antara Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)". Tak lupa shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kita semua.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih Bapak atas bimbingan, kritik, saran, dan masukannya kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan bapak.
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., Selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran dan kritik serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan bapak.
9. Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing pembantu yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan ibu.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bu Merta dan Mba Shela. Terima kasih sudah mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga mba dan ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Alandes dan Ibu Herlasti Ningrum yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang tak pernah putus

kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan karena selalu sabar dan Ikhlas membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Salah satu motivasi penulis dalam meraih cita-cita dan menjadi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang dilakukan demi menyekolahkan anakmu ini. Terima kasih Bapak ku selalu memberikan motivasi dan nasihat yang menguatkanku, terima kasih Ibu ku tersayang tidak pernah lelah medoakan setiap langkah anakmu. Terima kasih Bapak dan Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak mu. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan agar dapat melihat anakmu ini sukses dan dapat membahagiakan kalian Aamin.

13. Untuk Kakak dan Adik penulis, Kharisty Aulia Alan dan Aura Mufidah Alan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih untuk kalian telah menjadi saudariku sekaligus teman yang selalu menghibur dan tempat berkeluh kesah abangnya di rumah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kakakku dan adikku untuk bersama-sama membanggakan kedua orang tua.
14. Seluruh perangkat Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan, ilmu, dan juga berbagai hal lain yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menambah pengalaman serta pengetahuan.
15. Seluruh informan peneliti Pak Suranto, Pak Gatot Mulyanto, Pak Antono, Pak Darmanto, Bu Dian, Bu Lusia Rita, Bu Suprihatin, Bu Lastri, Bu Ita, Bu Sundari, Bu Dini Setia Ningrum, Bu Meli, Bu Sarti, dan Bu Eka yang telah bersedia menjadi informan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan data selama penulisan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Untuk Anisha Krisna Desasmi, selaku orang yang sudah menjadi tempat penulis untuk bercerita, bercanda, dan bermain. Terima kasih untuk segala keceriaan, pelajaran, dan kebersamaanya, terima kasih telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan

kesehatan, melimpahkan keberkahan dan memberikan kebahagiaan serta apa yang di impikan dapat tercapai dan menjadi kebanggaan kedua orang tua.

17. Untuk sahabat- sahabat sejak SMA penulis, Besti, Osa, Raihan, Ibnu, Doni, Rais serta seluruh teman-teman SMA Kebangsaaan Angkatan 5 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi *support system* dan selalu memperlakukan penulis dengan sangat baik. Semoga sukses dan menjadi kebanggaan orang tua.
18. Untuk sahabat-sahabat sejak SMP penulis, Ghozi, Revan, Igo, Rio, dan Bima yang sudah menjadi teman bermain penulis. Terima kasih untuk pengalaman, keseruan, dan kebersamaannya. Semoga sukses dan menjadi kebanggaan orang tua.
19. Untuk teman-teman program penelitian MBKM, Sri, Novika, Reka, Zacky, Aderia, Yulisa, Diska, Rayhan, dan Ramadhan yang telah menjadi teman seperjuangan selama program penelitian MBKM berlangsung. Terima kasih untuk ilmu dan kebersamaannya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan.
20. Untuk teman-teman seperjuangan Gilang, Afif, Bayu, Arya, Tama, Fadhlan, Elsyifa, Nafisa, Reysia, Panji, Syendi, Yuan, Kadek, Meissy, Ribka, Regita, Anas, pando, pito, Omar, Okta, Afwan serta seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta kebersamaan dalam suka duka selama perkuliahan. Semoga kalian semua diberikan kesuksesan dan menjadi kebanggaan orang tua.
21. Untuk Bang Hugo, Bang Farhan, Mbak Agnes, Mbak Cindy, dan Mba Nanda. Terima Kasih atas pengalaman, keseruan, dan kebersamaannya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan.
22. Untuk “member tetap”, sahabatku Dwi Anggoro Kasih, Suci Lala Setia, dan Anisha Krisna Desasmi. Terima kasih sudah menjadi teman bermain dan sahabat yang telah memberikan pengalaman, keseruan, dan kebersamaan. Semoga kalian menjadi *rich people* dan menjadi kebanggaan orang tua.
23. Teman-teman KKN Desa Teba Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Iswadi, Rayya, Fitri, Anita, Ayu, dan Finna serta

masyarakat Desa Teba Bunuk. Terima kasih aku ucapakan kepada kalian telah mau bersama-sama dan memberikan pengalaman kehidupan yang baru. Semoga kalian selalu dipermudah segala urusannya dan selalu diberikan kesehatan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Penulis

Tegas Adli Alan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **viii**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 12

II. TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Pengertian Pembangunan Desa 13
2.1.1 Pembangunan Perdesaan 14
2.2 Pengertian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa 15
2.2.1 Pilar Pembangunan *SDGs* Desa 15
2.2.2 Tujuan *SDGs* Desa Pendukung Peningkatkan IPM 18
2.2.3 Sistem Skor Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa* 20
2.3 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 21
2.3.1 Manfaat IPM 22
2.3.2 Perhitungan Indikator IPM 22
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 24
2.4.1 Unsur-Unsur Implementasi 26
2.4.2 Model Implementasi Soren C.Winter 26
2.5 Kerangka Pikir 30

III. METODE PENELITIAN **33**
3.1 Tipe Penelitian 33
3.2 Lokasi Penelitian 33
3.3 Fokus Penelitian 34
3.4 Sumber Data dan Jenis Data 35
3.5 Teknik Penentuan Informan 35
3.6 Teknik Pengumpulan Data 36
3.7 Teknik Pengolahan Data 39
3.8 Teknik Analisis Data 40
3.9.Teknik Validasi Data 41

IV. GAMBARAN UMUM 42
4.1 Gambaran Umum Desa Margototo 42
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Margototo 42
4.1.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Margototo 45
4.1.3 Tingkat Pendidikan Desa Margototo 46
4.1.4 Lembaga Kemasyarakatan 46
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Margototo 47
4.2 Gambaran Umum Desa Margosari 48
4.2.1 Sejarah Berdirinya Desa Margosari 48
4.2.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Margosari 50
4.2.3 Tingkat Pendidikan Desa Margosari 52
4.2.4 Lembaga Kemasyarakatan 52
4.2.5 Struktur Pemerintahan Desa margosari 53

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 54
5.1 Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *SDGs* Desa dalam Meningkatkan IPM di Desa Margototo 55
5.1.1 Prilaku hubungan antar organisasi 55
5.1.1.1 Komitmen 55
5.1.1.2 Koordinasi antar Organisasi 61
5.1.2 Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah 63
5.1.2.1 Kontrol Organisasi 63
5.1.2.2 Etos Kerja 64
5.1.2.3 Norma-Norma Professionalisme 66
5.1.3 Prilaku Kelompok Sasaran 68
5.2 Hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *SDGs* Desa dalam Meningkatkan IPM di Desa Margosari 69
5.2.1 Prilaku hubungan antar organisasi 69
5.2.1.1 Komitmen 69
5.2.1.2 Koordinasi antar Organisasi 75
5.2.2 Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah 77
5.2.2.1 Kontrol Organisasi 78
5.2.2.2 Etos Kerja 79
5.2.2.3 Norma-Norma Professionalisme 80
5.2.3 Prilaku Kelompok Sasaran 82
5.3 Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *SDGs* Desa dalam Meningkatkan IPM di Desa Margototo 83
5.3.1 Perilaku hubungan antar organisasi 84
5.3.1.1 Komitmen 84
5.3.1.2 Koordinasi antar Organisasi 91
5.3.2 Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah 93
5.3.2.1 Kontrol Organisasi 93
5.3.2.2 Etos Kerja 94
5.3.2.3 Norma-Norma Professionalisme 95
5.3.3 Prilaku Kelompok Sasaran 96
5.4 Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *SDGs* Desa dalam Meningkatkan IPM di Desa Margosari 98
5.4.1 Perilaku hubungan antar organisasi 98

5.4.1.1 Komitmen 98
5.4.1.2 Koordinasi antar Organisasi 105
5.4.2 Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah 106
5.4.2.1 Kontrol Organisasi 106
5.4.2.2 Etos Kerja 107
5.4.2.3 Norma-Norma Professionalisme 109
5.4.3 Prilaku Kelompok Sasaran 110
5.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *SDGs* Desa dalam Meningkatkan IPM di Desa Margototo dan Desa Margosari 112
5.5.1 Prilaku hubungan antar organisasi 112
5.5.1.1 Komitmen 112
5.5.1.2 Koordinasi antar Organisasi 115
5.5.2 Prilaku implementator (aparat/birokrat) tingkat Bawah 116
5.5.2.1 Kontrol Organisasi 116
5.5.2.2 Etos Kerja 116
5.5.2.3 Norma-Norma Professionalisme 116
5.5.3 Prilaku Kelompok Sasaran 117
5.6 Hasil Perhitungan IPM Desa Margototo dan Desa Margosari Tahun 2022 117

VI. SIMPULAN DAN SARAN 119
6.1 Simpulan 119
6.2 Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tahun 2023 5
2. Skor Capaian *SDGs* Desa di Desa Margosari tahun 2022 8
3. Skor Capaian *SDGs* Desa di Desa Margototo tahun 2022 8
4. Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator 23
5. Informan Penelitian 36
6. Nama-Nama Kepala Desa Margototo 44
7. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo 45
8. Luas Lahan Masyarakat Desa Margototo 45
9. Pngelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margototo 46
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa Margototo 46
11. Nama-Nama Kepala Desa Margosari 50
12. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margosari 51
13. Luas Lahan Masyarakat Desa Margosari 51
14. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margosari 52
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa Margosari 52
16. Kemudahan Akses Lokasi Layanan Pendidikan di Desa Margototo tahun 2022 87
17. Jumalah UMKM di Desa Margototo tahun 2022 88
18. Kelompok Sasaran Kebijakan SDGs Desa Margototo Tahun 2022 97
19. Kemudahan Akses Lokasi Layanan Pendidikan di Desa Margosari tahun 2022 101

20. Jumlah UMKM di Desa Margosari tahun 2022 103

21. Kelompok Sasaran Kebijakan SDGs Desa Margosari tahun 2022 110

22. Komponen pembentuk IPM Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang tahun 2022 117

23. Indeks Dimensi IPM Desa Margototo dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang tahun 2022 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir 32
2. Peta Desa Margototo 43
3. Struktur Pemerintahan Desa Margototo 47
4. Peta Desa Margosari 48
5. Struktur Pemerintahan Desa Margosari 53
6. Pelaksanaan Imunisasi bayi di Desa Margototo 56
7. Pemberian obat cacing kepada anak di Desa Margototo 57
8. Akses Sekolah di Desa Margototo 58
9. Pelatihan UMKM Kecamatan Metro Kibang Pada Tahun 2022 59
10. Akses Sekolah di Desa Margosari 72
11. Pelaksanaan PKTD di Desa Margosari 73
12. Daftar Hadir Perangkat Desa Margototo dalam Musrenbang tahun 2021 94
13. Daftar Hadir Perangkat Desa Margosari dalam Musrenbang tahun 2021 .. 108

DAFTAR SINGKATAN

SDGs	: *Sustainable Development Goals*
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
UU	: Undang-Undang
Permendes PDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Pospindu	: Pos Pembinaan Terpadu
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
GAPOKTAN	: Gabungan kelompok Tani
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
IT	: *Information And Technology*
SDM	: Sumber Daya Manusia
AHH	: Angka Harapan Hidup

RLS	: Rata-Rata Lama Sekolah
HLS	: Harapan Lama Sekolah
PP	: Pengeluaran Perkapita

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha yang direncanakan dengan tujuan mengubah keadaan yang tidak dikehendaki menuju arah yang dikehendaki demi meningkatkan taraf hidup masyarakat (Soekartawi, 1990). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Shuida, 2016). Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Pada tahun 2015 para pemimpin 193 negara anggota PBB menyepakati dan mengesahkan sebuah dokumen atau suatu komitmen yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit*. *SDGs* adalah program yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu rencana aksi global yang bertujuan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB berkomitmen untuk mengimplementasikan *Suistanable Development Goals (SDGs)* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Semenjak diberlakukannya Perpres No. 59 Tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah melukakan beberapa program dalam percepatan pencapaian *SDGs* Nasional maupun *SDGs* Desa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program-program diantaranya adalah memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra-kerja dan Kartu sembako murah. Bantuan-bantuan tersebut dialokasikan kepada masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkannya.Selain itu, pemerintah juga menetapkan tata kelola impor untuk meningkatkan produk domestik.

Kedua, upaya pemerintah dalam mengurangi angka kelaparan dan memperbaiki gizi masyarakat diantaranya adalah memberikan bantuan sembako murah,meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, penguatan pelaksanaan dan pengawasan keamanan pangan,pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk meningkatkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta peningkatan jangkauan dan layanan kesehatan masyarakat.

Ketiga, dalam bidang kesehatan, Kementerian kesehatan melakukan peningkatkan mutu pelayanan dan melengkapi fasilitas kesehatan di daerah terpencil, menetapkan program Indonesia sehat, revitalisasi posyandu, melakukan tes kesehatan, penyuluhan dan perawatan untuk pembawa virus HIV.

Keempat, Program yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang tangguh dan meningkatkan industri berkelanjutan adalah melalui program peningkatan teknologi industri dan program pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah juga melakukan pengoptimalan zona-zona industri,membangun infrastruktur digital nasional, mengakomodasikan industri berkelanjutan seperti kemampuan industry berbasis teknologi bersih, perbaikan alur aliran barang dan material, menarik investasi asing dan mendukung revolusi industri 4.0 sebagai strategi dalam menghadapi industri 4.0.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan *SDGs* Nasional hingga ke tingkat desa, Kemendesa PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menyusun road map atau dokumen induk perencanaan desa yang bernama *SDGs* Desa. Di mana melalui Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang juga berfokus terhadap upaya pencapaian *SDGs* Desa, Mendes PDTT menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa) dan dokumen penganggaran desa (APBDesa) dengan mempedomani *SDGs* Desa. Tujuannya agar pembangunan di level desa lebih terstruktur, sistematis dan mempunyai tolak ukur yang jelas (Iskandar, 2020).

Menurut Iskandar (2020), apabila permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan, artinya, akar persoalan pembangunan di Indonesia ada di desa. Desa adalah sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan juga rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibandingkan dengan kota. Karena itulah memperbaiki pembangunan manusia, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan Indonesia Maju, mulailah dari desa (Iskandar, 2020).

Adapun urgensi *SDGs* Desa bagi pemerintah desa dan warga desa, sebagai berikut:

1) Sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran karena didasarkan pada data dan kondisi riil masyarakat desa. Umumnya, rencana pembangunan yang tidak didasarkan pada data yang akurat akan menghasilkan pembangunan yang tidak tepat sasaran.
2) Sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di desa.

Bagi Indonesia desa memiliki dua posisi strategis, oleh karena itu, *SDGs* Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Angka 74 persen tersebut diperoleh berdasarkan aspek kewilayahan dan aspek kewarganegaraan. *Pertama,* dari aspek kewilayahan, sebesar 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa. Sebanyak 12 dari 18 tujuan *SDGs* Desa berkaitan erat dengan kewilayahan desa, khususnya pada tujuan 7 sampai 18 yang berkaitan erat dengan kewilayahan desa. *Kedua,* dari aspek kewargaan, jumlah warga yang memegang KTP dan tercatat tinggal di desa mencapai 43 persen. Indeks Pembangunan Desa tahun 2021 melaporkan ada 214 juta penduduk desa. Apabila ditinjau dari sisi tujuan Pembangunan, maka diketahui bahwa ada 6 tujuan *SDGs* Desa (nomor 1-6) berkaitan erat dengan warga desa (Iskandar,2020).

SDGs Desa adalah upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Desa. *SDGs* Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendes PDTT No.21 Tahun 2020).

Pada *SDGs* Desa terdapat 17 tujuan pembangunan yang sama dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam *SDGs* Global dan Nasional dan ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kebudayaan dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum

dalam *SDGs* global maupun nasional. Sehingga dalam *SDGs* Desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Sebagaimana program *SDGs* bertujuan untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian baik, kesehatan ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan sosial. Pada perkembangan saat ini, terdapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu daerah atau negara dalam pembangunan manusia. Adapun komponen dari IPM yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang kesejahteraan Masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia tentu menjadi sangat penting terutama ketika hendak menerapkan program pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan sampai ke ranah global. Untuk memenuhi harapan itu, maka komponen IPM tentu menjadi hal prioritas yang perlu diperhatikan sebagai pendukung *SDGs* dikarenakan dari 18 tujuan *SDGs* Desa terdapat beberapa target yang menyinggung tentang pembangunan manusia yaitu tujuan *SDGs* Desa Ketiga, tujuan *SDGs* Desa keempat, dan tujuan *SDGs* Desa kedelapan. Pada Kabupaten Lampung Timur sendiri terhitung sebagai salah satu kabupaten yang mengalami peningkatan angka IPM, berikut data IPM Provinsi Lampung:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung tahun 2023

Wilayah	**Indeks Pembangunan Manusia**		
	2020	**2021**	**2022**
Lampung barat	67,80	67,90	68,39
Tanggamus	66,42	66,65	67,22
Lampung Selatan	68,36	68,49	69,00
Lampung Timur	69,37	69,66	70,58
Lampung Tengah	70,16	70,23	70,80
Lampung Utara	67,67	67,89	68,33
Way Kanan	67,44	67,57	68,04
Tulang Bawang	68,52	68,73	69,53
Pesawaran	65,79	66,14	66,70

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2021	2022
Pringsewu	70,30	70,45	70,98
Mesuji	63,63	64,04	64,94
Tulang Bawang Barat	65,97	66,22	67,13
Pesisir Barat	63,91	64,30	65,14
Kota Bandar Lampung	77,44	77,58	78,01
Kota Metro	77,19	77,49	77,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Kabupaten Lampung Timur setiap tahunya mengalami peningkatan angka IPM dimana pada tahun 2022 mendapatkan nilai IPM sebesar 70,58, hal ini menandakan bahwa Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, aspek dan program yang ada sudah terlaksana secara baik dan terpenuh.

Desa Margototo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Desa Margosari merupakan desa yang terlahir dari hasil pemekaran dari desa induknya yaitu Desa Margototo yang terletak di kecamatan Metro Kibang Lampung Timur. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Kedua desa tersebut saat ini memiliki status IDM “Desa Maju”.

Prioritas pencapaian *SDGs* Desa sesuai amanat Permendesa No. 13 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya mewujudkan hal tersebut, maka diperlukannya percepatan pencapaian *SDGs* Desa. Dari beberapa hal mengenai prioritas pembangunan *SDGs* Desa yang ada akan dilihat di Desa Margosari dan Desa Margototo yang terletak di Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur.

Pada hasil Musrenbang Desa Margosari tahun 2021 untuk pelaksanaan pembanguan tahun 2022 terdapat 86 usualan rencana program Pembangunan. Dari hasil Musrenbang Desa Margosari tahun 2021 tersebut sebanyak 22 usulan rencana program pembangunan atau sebesar 25 persen yang masuk kedalam skala prioritas RKP Desa Margosari tahun 2022. Pada RKP Desa Margosari tahun 2022 terdapat 51 program yang menjadi skala prioritas program yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun pada hasil Musrenbang Desa Margototo tahun 2021 untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022 terdapat 206 usulan rencana program pembangunan. Dari hasil Musrenbang Desa Margototo tahun 2021 tersebut sebanyak 40 usulan program pembangunan atau sebesar 19 persen yang masuk kedalam skala prioritas RKP Desa Margototo tahun 2022. Pada RKP Desa Margototo tahun 2022 terdapat 29 program yang menjadi skala prioritas program yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Berdasarkan data hasil Musrenbang Desa tahun 2021 untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022 di Desa Margototo terdapat 206 usulan rencana program Pembangunan, sedangkan usulan rencana program Pembangunan di Desa Margosari jauh lebih sedikit, hanya sebanyak 86 usulan rencana program pembangunan, akan tetapi sebesar 25 persen dari usulan program pembangunan hasil Musrenbang Desa Margosari masuk kedalam skala prioritas program pembangunan atau kedalam RKPDes, sedangkan di Desa Margototo hanya sebesar 19 persen usulan program pembangunan hasil Musrenbang Desa yang masuk kedalam skala prioritas program pembangunan atau kedalam RKPDes.

Menurut pernyataan dari kedua sekretaris desa tersebut, mereka mengatakan bahwa pada tahun 2021 Desa Margototo dan Desa Margosari mulai melaksanakan pembangunan dan penginputan data desa berbasis *SDGs* Desa, akan tetapi sampai tahun 2022 Desa Margototo belum adanya skor capaian *SDGs* Desa. Berbeda halnya dengan Desa Margototo, Desa Margosari sudah

terdapat skor capaian *SDGs* Desa pada tahun 2022, dengan skor capaian sebagai berikut :

Tabel 2. Skor Capaian *SDGs* Desa di Desa Margosari tahun 2022

No	Tujuan SDGs Desa	Skor Capaian
1.	Desa Peduli Kesehatan	78,57
2.	Pendidikan Desa Berkualitas	41,22
3.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	52,14

Sumber : Desa Margosari, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya pada tahun 2022 Desa Margosari sudah dapat dikatakan melaksanakan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam mewujudakan Indeks Pembangunan Manusia dengan skor capaian pada bidang kesehatan sebesar 78,57, bidang pendidikan sebesar 41,22, dan bidang kesejahteraan sebesar 52,14 dengan skala penilaian 0-100.

Berbeda halnya dengan Desa Margototo yang dimana pada tahun 2022 Desa Margototo belum adanya skor capaian *SDGs* Desa, sehingga peneliti dapat menggambarkan skor capaian *SDGs* Desa Margototo sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Capaian *SDGs* Desa di Desa Margototo tahun 2022

No	Tujuan SDGs Desa	Skor Cpaian
1.	Desa Peduli Kesehatan	0
2.	Pendidikan Desa Berkualitas	0
3.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	0

Sumber : Diolah oleh peneliti,2023

Berdasarkan tabel tersebut bahwasanya pada tahun 2022 Desa Margototo belum dapat dikatakan melaksanakan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam mewujudakan Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan Desa Margototo belum terdapat skor capaian *SDGs* Desa pada tahun 2022. Menurut keteranagan Sekretaris Desa Margototo, mereka telah melakukan penginputan data *SDGs*

Desa pada aplikasi *SDGs* Desa mulai dari tahun 2021, akan tetapi sampai tahun 2022 skor capaian *SDGs* Desa untuk Desa Margototo tidak keluar.

Terkait dengan peneletian terdahulu, ada beberapa penelitian yang telah dilakukakan oleh para peneliti dengan isu desa. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fardh'lu Rizky dan Dadang Mashur pada tahun 2022 dengan judul Penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa dimana pencapaian *SDGs* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit masih belum terlaksana 100%, dengan rata-rata penilaian yang didapatkan 43.60 dan tidak semua tujuan *SDGs* Desa terlaksana. Penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit, yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang *Sustainable Development Goals,* Belum Optimalnya perencanaan *Sustainable Development Goals* Desa, dan Kurangnya Kualitas Sumber Daya di Desa Perkebunan Sungai Parit.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung Linggarwati, Agus Haryanto, Renny Miryanti, dan Arief Bakhtiar Darmawan pada tahun 2021 dengan judul Implementasi *SDGs* di Desa Pandak Kecamatan Batirraden Kabupaten Banyumas yang diterbitkan di rosiding Seminar Nasional dan Call for Papers. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa Desa Pandak sudah menerapkan program pembangunan berbasis *SDGs* dengan baik yang diawali dengan perencanaan yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. begitupula dalam implementasinya yang mengikutsertakan peran serta masyarakat. Hambatan yang dialami adalah anggaran yang terbatas, Pembangunan infrastruktur yang masih tergantung pada pembiayaan APBD dan program pembangunan dari kabupaten dan adanya masa pandemi yang membuat tidak maksimalnya

implementasi karena anggaran dan sumber daya diprioritaskan pada penanganan covid dan bantuan terdampak covid. Masalah pendataan juga menjadi kendala dimana data sudah bisa terkumpul dengan baik, namun terjadi hambatan pada aplikasi yang digunakan untuk menginput data *SDGs*.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Jifa Hang Malay dan Dadang Mashur pada tahun 2023 dengan judul Analisis Pembangunan Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Sungai Selari dilihat berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan belum dapat mewujudkan tujuan-tujuan *Sustainable Development Goals* Desa. Desa Sungai Selari hanya menjalankan 11 dari 18 tujuan *SDGs* Desa dengan skor 45.71. Tidak terwujudnya tujuan-tujuan *SDGs* Desa di desa Sungai Selari memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya program pembangunan desa dimana program-program yang direncanakan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa sehingga tujuan *SDGs* Desa yang belum dibutuhkan oleh masyarakat tidak direncanakan. Faktor penghambat lainnya adalah tidak terbacanya ataupun tidak ditemukannya data yang diinput oleh SID pada Sistem Informasi Desa milik Kemendesa.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyatun, Hesti Respatiningsih, dan Adi Sucipto pada tahun 2023 dengan judul Evaluasi Implementasi *SDGs* Desa Krandegan Bidang Ekonomi sebagai Desa Mandiri Tahun 2022 yang diterbitkan di Journal.unimma. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa Skor perolehan nilai *SDGs* Desa poin ke 8 di Kabupaten Purworejo sebesar 22,41 sedangkan nilai implementasi yang diperoleh oleh Desa Krandegan Bayan sebesar 29, 81. Artinya Desa Krandegan telah mengimplementasikan *SDGs* Desa poin ke 8 dengan baik. Hal ini didukung oleh aktor pemerintah, akademisi dan pelaku bisnis di desa Krandegan Bayan yang solid.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Adi Nawir, Syamsudin, dan Jusniaty pada tahun 2022 dengan judul Penerapan Program Sustainable Development Goals (*SDGs*) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan yang diterbitkan di Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa Penerapan Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementrian Desa tentang pelaksanaan Program *SDGs*. Meskipun Keberlanjutan Program *SDGs* ini masih dalam tahap perencanaan,terkait dari implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* ini masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Polewali, namun untuk penerapanya sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakuakan pendataan langsung kepada masyarakat dengan pembaharuan data 1 kali dalam 3 bulan.

Berdasarkan hasil pra-riset peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Desa (IPM) Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)".** Hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian *SDGs* tahun 2022. Bahwa Desa Margosari sudah dapat dikatakan terlaksana dikarenakan Desa Margosari sudah adanya skor capaian *SDGs* Desa, sedangkan Desa Margototo belum dapat dikatakan terlaksana dikarenakan Desa Margototo belum adanya skor capaian *SDGs* Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

"Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo?".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitin ini dilaksanakan dengan tujuan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

   Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau refrensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan masyarakat luas tentang pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo.

b. Secara Praktis

   Penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat dan pemerintah desa terkhususnya pemerintah Desa Margosari dan Desa Margototo mengenai pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Permendagri No. 114 tahun 2014)

Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan

masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.1 Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan local kawasan perdesaan yang sangat berhubungan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan (urban bias). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa (Shuida,2016)

Menurut Shuida (2016), Prioritas pembangunan berbasis perdesaan (rural-based development) meliputi:

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan;
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa;
5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan DesaKota;serta

7. Pengawalan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

2.2 Pengertian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa

Sebagai negara yang turut menandatangani Sustainable Development Goals (*SDGs*), Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, kebijakan, serta berbagai kegiatan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* hingga tahun 2030. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan menjadi payung hukum, sekaligus memberi arah bagi bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kalangan filantropi dan swasta, untuk berpadu menyatukan langkah mencapai target *SDGs*.

Menurut Iskandar (2020), *SDGs* merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal. Karena itulah, indikator *SDGs* dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, bahkan ke tingkat desa.

Secara eksplisit, tujuan *SDGs* dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan di manapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antarnegara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.

2.2.1 Pilar Pembangunan *SDGs* Desa

Iskandar (2020) membagi tujuan *SDGs* Desa kedalam 4 pilar Pembangunan yang saling terkait satu sama lain. 4 pilar pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pilar Pembangunan Sosial

   Melalui pilar ini, *SDGs* dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar manusia secara berkualitas, adil, setara, serta peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Adapun yang termasuk kedalam pilar pembangunan sosial adalah sebagai berikut :

   SDGs Desa 01: Desa tanpa kemiskinan.

   SDGs Desa 02: Desa tanpa kelaparan.

   SDGs Desa 03: Desa peduli kesehatan.

   SDGs Desa 04: Pendidikan desa berkualitas.

   SDGs Desa 05: Keterlibatan perempuan desa.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

   Untuk terwujudnya pilar sosial, maka diperlukan pilar ekonomi, yang memberi jalan bagi pembangunan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Adapun yang termasuk kedalam pilar pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

   SDGs Desa 07: Desa berenergi bersih dan terbarukan.

   SDGs Desa 08: Pertumbuhan ekonomi desa merata.

   SDGs Desa 09: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

   SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan.

   SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

   Pilar ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pilar ketiga, yaitu pilar lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan untuk memenuhi hak dasar manusia, dicapai dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini, serta terjaminnya kebutuhan generasi yang akan

datang. Adapun yang termasuk kedalam pilar pembangunan lingkungan adalah sebagai berikut :

SDGs Desa 06: Desa layak air bersih dan sanitasi.

SDGs Desa 11: Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.

SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim.

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut.

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

   Melalui pilar ini, *SDGs* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif, untuk terciptanya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Adapun yang termasuk kedalam pilar pembangunan hukum dan tata kelola adalah sebagai berikut :

   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

   SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Keempat pilar Pembangunan tersebut menjadi warna dalam tujuan *SDGs* Desa. Selain itu, tentu ada keterkaitan atau hubungan interdependensi antara tujuan *SDGs* Desa yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pencapaian satu tujuan, akan memberi pengaruh terhadap tujuan lainnya. Tujuan *SDGs* Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan.
2. Desa tanpa kelaparan.
3. Desa peduli kesehatan.
4. Pendidikan desa berkualitas.
5. Keterlibatan perempuan desa.
6. Desa layak air bersih dan sanitasi.
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan.
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata.

9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.
10. Desa tanpa kesenjangan.
11 . Kawasan permukiman desa aman dan nyaman.
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
13. Desa tanggap perubahan iklim.
14. Desa peduli lingkungan laut.
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan.
17. Kemitraan untuk pembangunan desa.
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

2.2.2 Tujuan *SDGs* Desa Pendukung Peningkatkan IPM

Iskandar (2020) dalam bukunya menjelaskan bahwa pada *SDGs* Desa terdapat 3 dari 18 tujuan *SDGs* Desa yang menjadi pendukung dalam peningkatkan IPM. Dari 3 tujuan *SDGs* Desa tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *SDGs* Desa 03: Desa Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, bahwa proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke rumah sakit, dilihat dari jenis transportasi, waktu tempuh dan biaya, hasilnya adalah: mudah 37,1 persen; sulit 36,9 persen; dan sangat sulit 26 persen.

Untuk itulah, dalam rangka mencapai tujuan *SDGs* Desa tersebut, pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan; terjangkaunya jaminan

kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; pengendalian penyakit HIV/ AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah), pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.

2. *SDGs* Desa 04: Pendidikan Desa Berkualitas

Pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan Pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan Pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.

3. *SDGs* Desa 08: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan *SDGs* Desa ini, di antaranya dengan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi bagl semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa (PKTD) yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang

memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan; minimal 51% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa mendaptkan akse permodalan formal; serta terdapatnya akses permodalan dan layanan keuangan.

2.2.3 Sistem Skor Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*

Menurut Iskandar (2020), untuk mengetahui sejauh mana dan apakah proses-proses adopsi perencanaan dan pelaksanaan *SDGs* sudah terealisasikan dibuatlah sistem skor dari angka 0-100 dan menilai empat aspek-aspek *Sustainable Development Goals.* Berikut penjelasan skor skala dalam angka 0-100:

1. Belum (1-25)

   Daerah masih belum fokus pada pencapaian *SDGs*, dan masih belum berkomitmen untuk pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian *SDGs* melalui perubahan-perubahan kebijakan dan progam untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

2. Komitmen (26-50)

   Daerah mulai memperhatikan dan menunjukkan komitmen untuk pencapaian *SDGs*. Hal ini ditunjukkan dengan dimulainya menyusun rencana aksi daerah (RAD) Dan upaya khusus mempercepat pencapaian *SDGs* dengan cara membuat perubahan-perbaikan untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

3. Melakukan (51-75)

   Daerah telah memperlihatkan komitmen dan telah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian *SDGs*. Walau demikian, masih dibutuhkan upaya-upaya lain untuk mencapai tahapan yang lebih baik untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi

dan manfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian *SDGs* untuk membuat perubahan-perubahan demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.

4. Telah Melaksankan (76-100)

   Daerah telah memperlihatkan komitmen dan telah melaksanakan berbagai upaya inovatif untuk pencapaian *SDGs*. Upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi dearah lain, untuk penerapan dan pelaksanaannya guna memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat. Serta dan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian *SDGs* untuk membuat perubahan-perubahan untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

2.3 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya (BPS Sidoarjo,2018)

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah (BPS Sidoarjo,2018)

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup

2. Pengetahun

   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

   a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak

   Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.3.1 Manfaat IPM

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
3. IPM merupakan data strategis; selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3.2 Perhitungan Indikator IPM

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Perhitungan tiap-tiap indikator penyusun IPM secara rumus dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

   Berdasarkan angka harapan hidup yang dihasilkan, besarnya nilai indeks kesehatan dari wilayah yang bersangkutan dapat dihitung dengan formula:

$$Ikesehatan = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan :
AHH = Angka harapan hidup
AHH_{min} = Nilai minimum dari AHH
AHH_{maks} = Nilai maksimum dari AHH

2. Dimensi Pengetahuan

   Untuk perhitungan dimensi pengetahuan, terlebih dahulu dihitung nilai dari dua indikator yang ditentukan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, setelah itu dilakukakan perhitungan untuk indeks pengetahuan.

$$I\text{HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}S_{\text{min}}}{\text{HLS}_{maks} - \text{HLS}_{min}}$$

$$I\text{RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{maks} - \text{RLS}_{min}}$$

$$I pengetahuan = \frac{I\text{HLS} + I\text{RLS}}{2}$$

   Keterangan :
   IRLS : Indeks rata-rata lama sekolah
   RLS_{min} : Nilai minimum dari RLS
   RLS_{maks} : Nilai maksimum dari RLS
   IHLS : Indeks harapan lama sekolah
   HLS_{min} : Nilai minimum dari HLS
   HLS_{maks} : Nilai maksimum dari HLS

3. Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran)

$$I\text{pegeluaran} = \frac{\text{In(pengeluaran)} - \text{In(pengeluaran}_{\text{min}})}{\text{In(pengeluaran}_{\text{maks}}) - \text{In(pengeluaran}_{\text{min}})}$$

   Keterangan:
   Ipengeluaran : Indeks Pengeluaran
   In(pengeluaran) : Pengeluaran per kapita
   $\text{In(pengeluaran}_{\text{min}})$: Pengeluaran per kapita minimum
   $\text{In(pengeluaran}_{\text{maks}})$: Pengeluaran per kapita maksimum

   Tabel 4. Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator

Indikator	**Satuan**	**Minimum**		**Maksimum**	
		UNDP	**BPS**	**UNDP**	**BPS**
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U$)	26.572.352** (Rp)

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023

4. Agregasi

   Setelah diketahui nilai indeks dari tiap-tiap dimensi, langkah selanjutnya adalah menghitung agresi atau nilai IPM dengan Menggunaka rata-rata geometrik.

$$IPM = \sqrt[3]{Ipengetahuan\ x\ Ipengetahuan\ x\ pendapatan}$$

   Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni :

   - IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai IPM < 60
   - IPM kelompok “sedang” dengan kriteria 60 ≤ Nilai IPM < 70
   - IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria 70≤ Nilai IPM < 80
   - IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria Nilai IPM ≥ 80.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan van Horn (dalam Handoyo,2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Menurut Salusu (2002) dalam (Mustari,2015), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran.Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam (Wahab,2012) menjelaskan makna implementasi kebijakan bahwa, Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Hill and Hupe (2002) dalam (Handoyo, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai actor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (Mustari,2015) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

2.4.1 Unsur-Unsur Implementasi

Adapun unsur-unsur Implementasi menurut Suratman (2017) adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pelaksana. Implementor kebijakan yaitu pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi.

b. Adanya Program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan publik tidak memiliki arti penting tanpa tindakan-tindakan yang riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Grindle menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan "kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang tersedia.

c. Kelompok Sasaran. Ini merupakan sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

2.4.2 Model Implementasi Soren C.Winter

Soren C.Winter (2008) dalam (Mustari,2015) memperkenalkan model implementasi integratif *(Integrated Implementation Model).* Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi
   a. Komitmen

      Komitmen organisasi menurut Richard M. Steers (dalam Mustari,2015) adalah rasa identifikasi, keterlibatan dan loyalitas yang dinyatakan oleh seseorang terhadap organisasinya. Dalam menjalankan hubungan antar organisasi dibutuhkan sikap saling percaya yang berawal dari sebuah janji yang dikeluarkan dalam bentuk pernyataan yang tercermin dalam bentuk tindakan, jadi apabila komitmen antar organisasi dijaga dengan baik maka harapan akan kesuksesan implementasi akan meningkat.

      Menurut May (dalam Mustari,2015) mengatakan bahwa komitmen adalah kunci keberhasilan pada pelaksanaan kebijakan, selain itu menurut Winter (2008) dalam (Mustari,2015) komitmen birokrasi tingkat bawah dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan merupakan faktor penting bagi mereka dalam mengambil Tindakan dalam sebuah kebijakan.

   b. Koordinasi antar organisasi

      Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi (Mustari,2015). Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi.

      Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik, Van Meter dan Van Hord (2005) dalam

(Mustari,2015) menjelaskan dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

2. Perilaku Implementator (Aparat/Birokrat) tingkat bawah

   a. Kontrol organisasi

      Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh staf, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja sehingga staf dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menurut Sarwoto (1981) dalam (Mustari,2015) pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

      Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan pimpinan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan dari pegawai-pegawai yang menjadi bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mustari,2015).

   b. Etos kerja

      Menurut Usman Pelly (1992) dalam (Mustari,2015) etos kerja adalah sikap yang muncul atas kemauan dan kesadaran sendiri yang didasari sistem orientasi nilai budaya terhadap pekerjaan

seseorang. Menurut Max Weber (dalam Mustari,2015) etos kerja adalah perilaku kerja yang etis dan menjadi kebiasaan kerja yang berporos pada etika., menurut Gertz (dalam Mustari,2015) etos kerja adalah sikap mendasar terhadap diri dan dunia dipancarkan hidup.

Berdasarkan beberapa pengertian etos kerja menurut para ahli dapat dipastikan bahwa etos kerja merupakan hal yang penting dalam suatu pekerjaan oleh karena itu seseorang perlu memilikinya sebagai penunjang dalam aktifitas pekerjaannya (Mustari,2015)

c. Norma-norma profesionalisme

Faktor sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan, sebab jika SDM lemah maka sudah barang tentu kebijakan tidak akan terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Edward III (dalam Mustari,2015) mengemukakan apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Implementasi kebijakan mengalami kendala karena faktor profesionalisme aparat yang masih kurang, hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja staf sangat baik akan tetapi tidak ditunjang dengan profesionalisme yang masih harus ditingkatkan.

3. Perilaku kelompok sasaran
    a. Respon positif

        Mazmanian dan Sabatier dalam subarsono (2005) dalam (Mustari,2015) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Tanpa dukungan kelompok sasaran maka kebijakan tidak akan maksimal dijalankan.

    b. Respon negatif

        Respon negatif dalam implementasi kebijakan Bagai sisi uang logam yang tidak dapat dipisahkan, respon negatif dari masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah.

Temuan Soren C.Winter (2008) dalam (Mustari,2015) bahwa pegawai yang bekerja tidak terlepas dari pengaruh pemerintah, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana mengimplementasikannya. Perhatian winter juga pada peran komitmen bahwa sejauh mana pegawai dalam bekerja mereka tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bertindak dalam melakukan pelayanan.

2.5 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, dari teori-teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan lebih cenderung melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo. Pencapaian *SDGs* merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden dan Kemendes PDTT, tentunya hal ini wajib dilaksanakan karena target dari pencapaian *SDGs* jatuh pada tahun 2030.

Dari fakta ini, peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan

Desa Margototo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Soren C.Winter (dalam Mustari,2015).

Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:

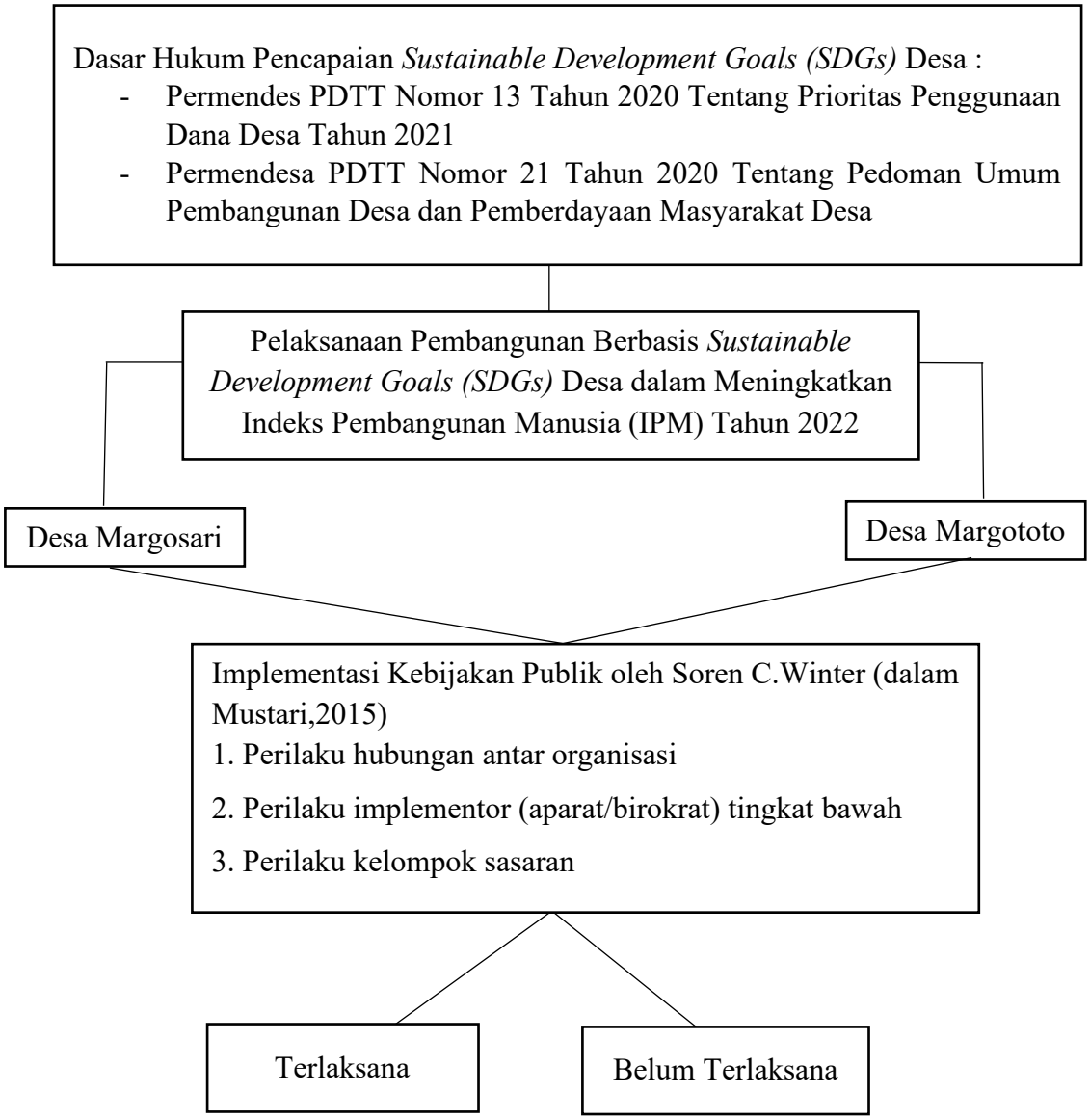

Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani dkk., 2020). Melalui penelitian kualitatif penulis dapat menggali informasi secara langsung pada objek yang diteliti dan dapat mengeksplorasi secara mendalam informasi yang ada pada di Desa Margosari dan Desa Margototo.

Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian dan pemahaman terhadap gelaja-gelaja sosial yang diamatinya. Pemahaman bukan saja dari sudut pandang peneliti tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gelaja dan fakta yang diamati berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti (Hardani, dkk, 2020). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif (Abdussamad,2021).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Margosari dan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (1980) dalam (Hardani, dkk, 2020) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti.

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi rumusan masalah yaitu terkait pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Soren C.Winter (dalam Mustari,2015).

1. Perilaku hubungan antar organisasi
   - Komitmen
   - Koordinasi antar organisasi
2. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah
   - Kontrol organisasi
   - Etos kerja
   - Norma-norma professional
3. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono,2013). Berdasarkan sumber data diatas, maka klasifikasi sumber–sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2013). Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan observasi secara langsung di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono,2013).

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif informan adalah suatu narasumber yang dapat memberikan informasi sangat penting, dalam menentukan informan yang akan peneliti gunakan untuk penelitian yaitu di tentukan dengan teknik *purposive sampling.*

Pada penelitian ini teknik *sampling* yang di gunakan yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan teknik yang dapat di ambil yaitu *purposive sampling* yang dimana *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Abdussamad,2021).

Oleh karena itu sampel yang di pilih sengaja di tentukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Suranto	Sekdes Desa Margosari
2.	Gatot Mualyanto	Kasi Kemasyarakatan Desa Margosari
4.	Antono	Sekdes Desa Margototo
5.	Darmanto	Kasi Kemasyarakatan Desa Margototo
6.	Dian	Bidan Desa Margototo
7	Lusia Rita	Bidan Desa Margosari
8	Suprihatin	Warga Desa Margototo
9	Lastri	Warga Desa Margototo
10	Ita	Warga Desa Margototo
11	Sundari	Warga Desa Margosari
12	Dini Setia Ningrum	Warga Desa Margosari
13	Meli	Warga Desa Margosari
14	Sarti	Warga Desa Margosari

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Abdussamad,2021). Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto dan bahan statistik.

2. Wawancara

   Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (Abdussamad,2021).

   Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaanya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka (Abdussamad,2021).

   Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Wawancara peneliti menggunakan wawancara mendalam dan direkan dengan menggunakan bantuan HP Samsung A54 dan dicatat dalam buku catatan pribad. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

   1. Pada tanggal 15 Januari 2024 peneliti mewawancarai Bapak Antono, Sekretaris Desa Margototo di Kantor Desa Margototo pada pukul 11.00 WIB

2. Pada tanggal 15 Januari 2024 peneliti mewawancarai Bapak Darmanto, Kasi Kemasyarakatan Desa Margototo di Kantor Desa Margototo pada pukul 10.05 WIB
3. Pada tanggal 22 Januari 2024 peneliti mewawancarai Ibu Suprihatin, Masyarakat dan Istri Ketua Gapoktan Desa Margototo di Rumah Informan pada pukul 11.10 WIB
4. Pada tanggal 23 Januari 2024 peneliti mewawancarai Ibu Dian, Bidan Desa Margototo di Puskesmas Kecamatan Metro Kibang pada pukul 11.35 WIB
5. Pada tanggal 07 Februari 2024 peneliti mewawancarai Ibu Lastri dan Ibu Ita, Masyarakat Desa Margototo di Lapangan SDN 02 Margototo pada pukul 11.45 WIB
6. Pada tanggal 30 Januari 2024 peneliti mewawancarai Bapak Suranto, Sekretaris Desa Margosari di Kantor Desa Margosari pada pukul 12.00 WIB
7. Pada tanggal 30 Januari 2024 peneliti mewawancarai Bapak Gatot Mulyanto , Sekretaris Desa Margototo di Kantor Desa Margosari pada pukul 10.08 WIB
8. Pada tanggal 07 Februari 2024 peneliti mewawancarai Ibu Lusia Rita, Bidan Desa Margosari di Poskesdes Desa Margosari pada pukul 10.00 WIB.
9. Pada tanggal 07 Februari 2024 peneliti mewawancarai Ibu Sundari, Ibu Dini Setia Ningrum, Ibu Meli, dan Ibu Sarti, Masyarakat Desa dan Anggota Kelompok Tani Desa Margosari di Poskesdes Desa Margosari pada pukul 10.00 WIB

3. Observasi

   Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004) dalam (Hardani, dkk, 2020). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) direncanakan dan

dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada tahap selanjutnya ialah setelah data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data tersebut sesuai analisis yang sudah dibuat. Menurut Notoatmodjo (2015), merumuskan proses pengolahan data melalui beberapa tahap, diantaranya:

1. Identifikasi Data

   Melakukan identifikasi ulang sebuah data, selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan. Identifikasi data dilakukan dengan membedah beberapa peraturan, jurnal ataupun buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

2. Klarifikasi Data

   Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada kelompok data yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya klarifikasi data ini, diharapkan proses penelitian akan terarah.

3. Sistematis Data

   Tahap ini sebuah data di susun pada setiap pokok secara sistematis, dengan maksud untuk mempermudah interpretasi data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan.

4. Interpretasi Data

   Tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti. Kemudian, peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis akhir. Peneliti akan menyimpulkan inti dari serangkaian penelitian dan kemudian peneliti akan membuat sebuah kesimpulan.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani, dkk, 2020). Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaiatan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Penyajian yang dimaksud yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

   Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjuti dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).

3.9. Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkanterhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Kusumastuti, 2019).

Menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mengecek melalui sumber lain. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan sumber yang sama dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Kusumastuti, 2019).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Desa Margototo

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Margototo

Terbentuknya Desa Margototo yaitu pada tahun 1956, yang terdiri sekitar kurang lebih 175 kepala keluarga dan dengan total total penduduknya sebanyak 661 jiwa. Mereka datang dalam beberapa gelombang dan berkelompok. Daerah hutan, padang ilalang harus ditaklukkan penduduk untuk dijadikan permukiman penduduk dan lahan pertanian. Hutan dan belukar yang ada harus dibabat bersih agar bisa dilalui dan digunakan sebelum ditanami beberapa jenis kayu serta tanaman lainnya untuk mencukupi sandan dan pangan.

Desa Margototo ini dahulunya merupakan hutan dan padang tumbuhnya ilalang. Pada tahun 1956-1960 baru mulailah orang-orang membuka kampung/desa. Di tahun 1960-1965 orang-orang yang bercocok tanam mulai membangun temapt tinggal berupa rumah darurat dengan istilah umbulan. Dan pengaturannya dari Desa Margorejo (Bedeng 25) yang kepala desanya dijabat oleh Muh. Soleh/Warsodimejo, maka dari itu desa ini dinamakan desa persiapan. Dari desa persiapan dari tahun ke tahun, semakin berkembang, sehingga pada tanggal 29 Maret 1969 Bapak Gubernur Lampung menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Desa Persiapan menjadi desa berdiri sendidri yang diberi nama “MARGOTOTO”. Pada waktu itu kepala desa yang menjabat adalah Bapak Miskun Diharjo.

Gambar 2. Peta Desa Margototo.

Sumber: Desa Margototo, 2023

Pada tahun 1969-1979 diadakanlah pemilihan kepala desa yang perta kalinya di Desa Margototo yang hasilnya dimenangkan oleh Bapan Siman. Kemudian dalam pemilihan kepala desa Margototo yang kedua kalinya ada di tahun 1980-1988 yang telah dimenangkan oleh Bapak Sarginen yang ditunjukkan dengan keberhasilan dari sektor pembangunan dan ekonomi. Maka dalam pemilihan kepala desa yang ketiga di Desa Margototo masih tetap dimennagkan oleh Bapak Sarginen pada periode 1989-1999. Selanjutnya, pemilihan kepala desa yang keempat yakni pada periode tahun 1990-2007 dimenangkan oleh Bapak Karmuji, dengan keberhasilan disektor pembangunan dan keamanan. Dalam pemilihan kepala desa yang kelima pada periode 2007-2014 kepala desa Margototo masih dijabat oleh Bapak Karmuji. Pemilihan kepala desa Margototo yang keenam ini kemudian dimenangkan oleh Bapak Toha pada masa periode tahun 2014-2019. Dalam pemilihan kepala desa yang ketujuh dimenangkan oleh Bapak Sukendar sampai sekarang.

Tabel 6. Nama-Nama Kepala Desa Margototo

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1969	Miskun Diharjo	Desa Persiapan
2.	1967-1979	Siman	Kepala Desa Pertama
3.	1980-1988	Sarginen	Kepala Desa Kedua
4.	1989-1999	Sarginen	Kepala Desa Yang Menjabat 2 Periode
5.	1999-2007	Karmuji	Kepala Desa Keempat
6.	2007-2014	Karmuji	Kepala Desa Yang Menjabat 2 Periode
7.	2014-2019	Toha	Kepala Desa Kelima
8.	2019-2025	Sukendar	Kepala Desa Keenam

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

Desa Margototo adalah salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang berada di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki luas: 1.732,25 Ha. Yang pada saat ini berpenduduk 6.136 jiwa yang terdiri dari 1.934 Kepala Keluarga (KK) dengan batas-batas desa yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sekampung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kibang dan Desa Margajaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kibang

Penduduk di Desa Margototo pada mulanya berasal dari desa sekitar diantaranya, ada dari Desa Sumbersari-Bantul, Desa Rejomulyo, dan Desa Margorejo Kecamatan Metro Selatan. Dengan keinginan sendiri pada tahun 1957, yang mayoritas penduduk desa berasal dari suku Jawa dengan jumlah mencapai 90%.

4.1.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Margototo

Dengan jumlah penduduk Desa Margototo menurut profil desa pada tahun 2021 yang berjumlah 6.136 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.934 kepala keluarga. Desa Margototo memiliki penduduk yang mempunyai usia-usia produktif yang paling banyak, sehingga masyarakat Desa Margototo mempunyai banyak potensi untuk melakukan usaha. Sedangkan jika dilihat dari mata pencaharian penduduk desa ini antara lain terdiri dari PNS, petani, buruh, pedagang, karyawan swasta, dan pertukangan. Persebaran mata pencaharian masyarakat Desa Margototo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	241 Jiwa
2.	Petani	1.821 Jiwa
3.	Wiraswasta	75 Jiwa
4.	Buruh	165 Jiwa
5.	Lainnya	203 Jiwa

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

Luas lahan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Margototo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Luas Lahan Masyarakat Desa Margototo

No	Pertanahan	Jumlah
1.	Pekarangan	114 Hektar
2.	Peladangan	12 Hektar
3.	Persawahan	235 Hektar
4.	Rawa	42 Hektar

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

4.1.3 Tingkat Pendidikan Desa Margototo

Untuk data tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tolak ukur mata pencaharian masyarakat di Desa Margototo yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margototo

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S2	6 Jiwa
2.	Sarjana S1	49 Jiwa
3.	SMA Sederajat	853 Jiwa
4.	SMP Sederajat	654 Jiwa
5.	SD Sederajat	265 Jiwa
6.	Belum Sekolah	189 Jiwa

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

4.1.4 Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa Margototo

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA
1.	PEMDES	8 Orang
2.	BPD	9 Orang
3.	KADUS	10 Orang
4.	RT	33 Orang
5.	LPM	30 Orang
6.	PKK	0 Orang
7.	GAPOKTAN	26 Kelompok
8.	KARANG TARUNA	1 Kelompok

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Margototo

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Margototo:

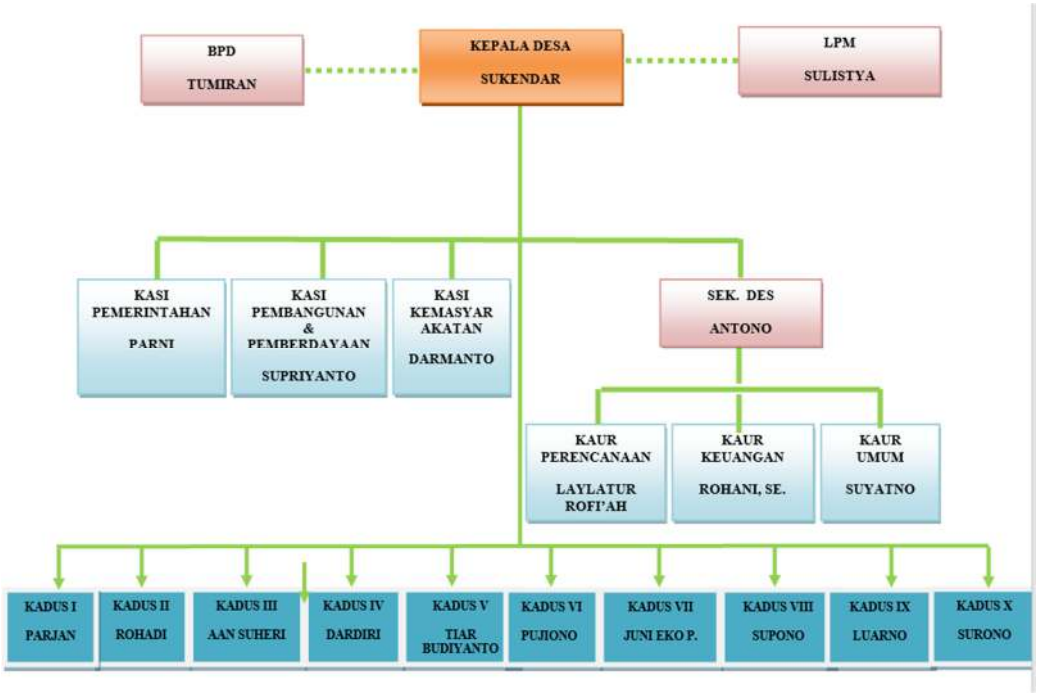

Gambar 3. Struktur Pemerintahan Desa Margototo.

Sumber: Prodeskel Margototo Tahun 2021

4.2 Gambaran Umum Desa Margosari

4.2.1 Sejarah Berdirinya Desa Margosari

Desa Margosari merupakan desa hasil pemekaran Desa Margototo atas usulan warga masyarakat desa yang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun IX dan Dusun X dan telah dinyatakan sebagai Desa Persiapan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 20 Maret 2002. Pada awalnya Desa Margosari di buka oleh masyarakat perambah hutan yaitu tahun 1956 dan merupakan pedukuhan dengan salah satu tokoh yang bernama Bapak Kaselar (Alm) dan hingga kini masih ada warga masyarakat desa sekitar yang menyebut Desa Margosari dengan sebutan Kaselar. Warga Desa Margosari mayoritas adalah suku Jawa dan 99% beragama islam dengan rata-rata berpenghasilan sebagai petani peladangan.

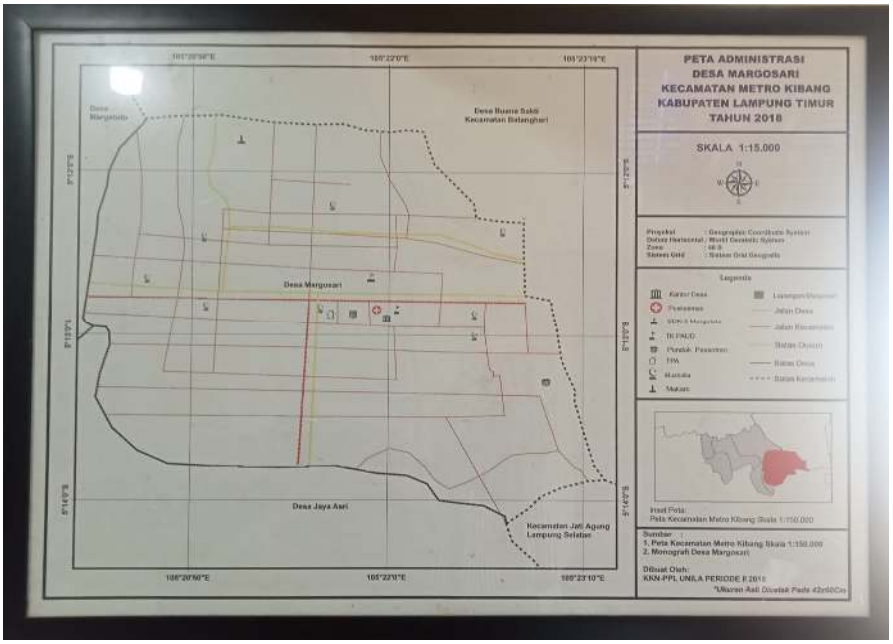

Gambar 4. Peta Desa Margosari.
Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

Penduduk Desa Margosari terdiri dari Kepala Keluarga 748 KK, jumlah jiwa 2276 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1167 jiwa dan perempuan 1009 jiwa. Desa Margosari mempunyai luas wilayah 788,97 ha yang terdiri dari lima dusun dan sebagian besar merupakan tanah pertanian/peladangan.

Desa Margosari secara geografis terletak disebelah Timur dari wilayah Kecamatan Metro Kibang dan berbatasan langsung dengan salah satu desa dari Kecamatan Batang Hari yaitu Desa Buana Sakti.

Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Margosari:

- Utara : Desa Buana Sakti Kec. Batang Hari
- Selatan : Desa Jaya Asri Kec.Metro Kibang
- Barat : Desa Margototo Kec.Metro Kibang
- Timur : Desa Buana Sakti Kec.Batang Hari

Nama Desa Margosari berasal dari bahasa Jawa yaitu dari kata Margo dan Sari yang berarti Margo=Jalan dan Sari=Bagian yang terbaik, jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Margosari mempunyai arti ”JALAN MENUJU KEBAIKAN”.

Periode masa jabatan Kepala Desa Margosari:

1. Periode Tahun 2002-2003

   Pada awal pembentukan Desa Persiapan Margosari Pjs. Kepala Desa dijabat oleh Sdr.Sunarto (Alm) kurang lebih beliau menjabat Kepala Desa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak dapat melanjutkan tugas dikarenakan sakit dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2003.

2. Periode Tahun 2003-2007

   Untuk menggantikan penjabat Kepala Desa yang telah meninggal dunia, maka pada bulan Oktober 2003 diadakan musyawarah desa untuk memilih kembali Pejabat Kepala Desa yang baru dan dipilih Sdr. Kateno sebagai pejabat Kepala Desa yang pada saat kepemimpinannya telah 4 (empat) kali diusulkan sebagai penjabat Kepala Desa Margosari (Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007).

3. Periode Tahun 2007-2013

   Kemudian Pada bulan Desember tahun 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa Definitif untuk periode 2007-2013 dan pada saat itu telah terpilih Sdri. Jumiatun sebagai Kepala Desa.

4. Periode Tahun 2013-2019

   Pada tanggal 11 Desember 2013 diadakan pemilihan kepala Desa Margosari periode 2013-2019 dan terpilih Sdr. Suwardi.

5. Periode Tahun 2019-2025

   Pada tanggal 20 November 2019 diadakan pemilihan kepala Desa Margosari periode 2019-2025 dan terpilih kembali Sdr. Suwardi yang sampai dengan saat ini.

Tabel 11. Nama-Nama Kepala Desa Margosari

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2002-2003	Sunarto	Desa Persiapan
2	2003-2007	Kateno	Menggantikan Kepala Desa Persiapan
3	2007-2013	Jumiatun	Kepala Desa Ketiga
4	2013-2019	Suwardi	Kepala Desa Keempat
5	2019-2025	Suwardi	Kepala Desa Yang Menjabat 2 Periode

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

4.2.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Margosari

Dengan jumlah penduduk Desa Margosari menurut profil desa pada tahun 2023 yang berjumlah 1.851 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 960 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 891 jiwa. Desa Margosari memiliki penduduk yang mempunyai usia-usia produktif yang paling banyak, sehingga masyarakat Desa Margosari mempunyai banyak potensi untuk melakukan usaha. Sedangkan jika dilihat dari mata pencaharian penduduk desa ini antara lain terdiri dari PNS, petani, buruh, pedagang, karyawan swasta, dan pertukangan.

Persebaran mata pencaharian masyarakat Desa Margosari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margosari

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	3 Jiwa
2.	Petani	781 Jiwa
3.	Wiraswasta	81 Jiwa
4.	Buruh	15 Jiwa
5.	Guru	9 Jiwa
6.	Bidan	5 Jiwa
7.	Mengurus Rumah Tangga	308 Jiwa
8.	Pelajar/Mahasiswa	169 Jiwa
9.	Belum Bekerja	461 Jiwa
10.	Lainnya	19 Jiwa

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

Luas lahan masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Margosari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Luas Lahan Masyarakat Desa Margosari

No	Pertanahan	Jumlah
1.	Perkebunan	93,47 Hektar
2.	Peladangan	518 Hektar
3.	Persawahan	12 Hektar
4.	Perumahan	118,75 Hektar
5.	Lain-lainnya	46,75 Hektar

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

4.2.3 Tingkat Pendidikan Desa Margosari

Untuk data tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tolak ukur mata pencaharian masyarakat di Desa Margosari yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Desa Margosari

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S2	1 Jiwa
2.	Sarjana S3	1 Jiwa
3.	Sarjana S1	27 Jiwa
4.	SMA Sederajat	326 Jiwa
5.	SMP Sederajat	542 Jiwa
6.	SD Sederajat	473 Jiwa
7.	Belum Tamat SD	161 Jiwa
8.	Belum Sekolah	305 Jiwa
9.	Diploma I/II	8 Jiwa
10.	Diploma III	7 Jiwa

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

4.2.4 Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 15. Lembaga Kemasyarakatan Desa Margosari

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA
1.	KELOMPOK TANI	63 Orang
2.	BUMDes	5 Orang
3.	ORGANISASI KEAGAMAAN	6 Orang
4.	RT/RW	25 Orang
5.	LPM	30 Orang
6.	PKK	27 Orang
7.	KARANG TARUNA	6 orang

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

4.2.5 Struktur Pemerintahan Desa margosari

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Margosari:

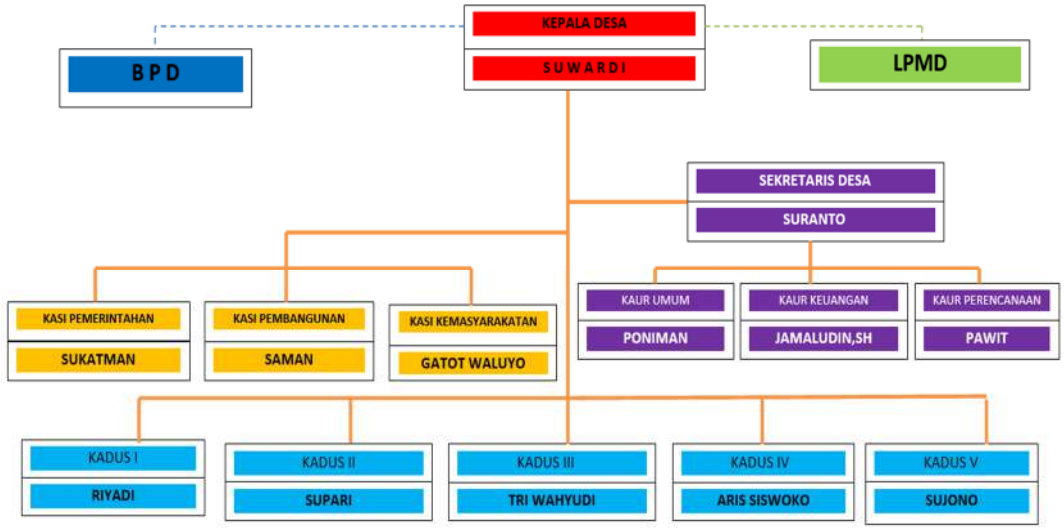

Gambar 5. Struktur Pemerintahan Desa Margosari.

Sumber: Prodeskel Margosari Tahun 2022

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margototo dan Desa Margosari dengan menggunakan implementasi kebijakan publik melalui 3 indikator yang terdiri dari prilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementator (aparat/birokrat) tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran sudah dapat dikatakan terlaksana.

1. Pada pelaksanaan Pembangunan Desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM di Desa Margototo memiliki keberhasilan pada aspek pendidikan yang dimana mendapatkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,89 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 12, 94 tahun, serta ditambah lagi akses terhadap layanan pendidikan di Desa Margototo sudah termasuk mudah diakses oleh warga desanya. Akan tetapi, Desa Margototo juga memiliki kekurangan pada aspek kesehatan terutama pada penanggulangan stunting yang masih belum adanya pemerataan pendistribusian bantuan PMT dan pada aspek ekonomi yang belum adanya pemerataan pebaikan jalan, terutama pada jalan usaha tani dan belum adanya pendampingan atau bantuan modal terhadap pelaku usaha, serta dalam penginputan data *SDGs* Desa, Pemerintah Desa Margototo masih memerlukan orang luar yang paham dengan teknologi atau *IT* untuk keperluan penginputan data pada *server SDGs* Desa.

2. Pada pelaksanaan Pembangunan Desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM di Desa Margosari memiliki keberhasilan pada ketiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dimana pada aspek kesehatan mendapatkan angka harapan hidup sebesar 73,72 tahun dan ditambah lagi di Desa Margosari dalam pendistribusian bantuan PMT terhadap anak yang mengalami stunting tidak mengalami ketidakmerataan, kemudian pada aspek pendidikan dimana akses terhadap layanan pendidikan di Desa Margosari sudah termasuk mudah diakses oleh seluruh warga desanya dan mendapatkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,82 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun, serta pada aspek ekonomi, Desa Margosari memiliki pengeluaran perkapita sebesar Rp10.358.000, serta dan pemerintah Desa Margosari juga memperhatiakan jalan usaha tani. Akan tetapi, Desa Margosari juga memiliki kekurangan dalam penginputan data *SDGs* Desa dimana Pemerintah Desa Margosari masih memerlukan orang luar yang paham dengan teknologi atau *IT* untuk keperluan penginputan data pada *server SDGs* Desa, serta pada aspek ekonomi juga memiliki kekurangan, yakni belum adanya pendampingan atau bantuan modal terhadap pelaku usaha.

6.2 Saran

Pada saat proses penelitian ini sedang berlangsung ditemukan ada beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis *SDGs* Desa dalam meningkatkan IPM pada tahun 2022 di Desa Margototo dan Desa Margosari. Maka, dirumuskan beberapa saran yang membangun. Secara terperinci saran-saran tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pada sisi prilaku hubungan antar organisasi, Desa Margototo dan Desa Margosari diharapkan senantiasa meningkatkan jejaring antarorganisasi dalam pelaksanaan *SDGs* Desa pada lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi pencapaian target *SDGs* Desa yang ada dengan cara kolaborasi sehingga kerja sama antarorganisasi dapat terwujud dan pelaksanaan *SDGs* dapat terlaksana dengan maksimal.

2. Pada sisi prilaku implementator (Aparat/Birokrat) tingkat bawah, mengingat tidak seluruh perangkat Desa Margototo dan Desa Margosari mengerti dengan perkembangan teknologi, maka perlu adanya pelatihan dan pendidikan kepada perangkat desa mengenai penginputan data *SDGs* Desa yang sedang dilaksanakan. Perlu diagendakan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentunya akan memudahkan dan mempersingkat waktu jalannya proses penginputan data *SDGs* Desa dan menghindari terjadinya *human error*.

3. Pada sisi perilaku kelompok sasaran, Desa Margototo dan Desa Margosari diharapkan menyediakan platform bagi masyarakat desa untuk melaporkan segala kekurangan yang ada di desa nya sehingga hal ini dapat meningkatkan angka partisipasi dan rasa kepedulian masyarakat desa dengan desanya sendiri.

4. Pada aspek kesehatan, Desa Margototo dan Desa Margosari diharapkan memfasilitasi para kader kesehatan dalam meningkatkan inisiatif melalui kegiatan-kegiatan pelatihan bersertifikat yang dapat menambah ide dan kemampuan para kader kesehatan.

5. Pada aspek pendidikan, Desa Margototo dan Desa Margosari diharapkan menyediakan tempat belajar yang menarik dan nyaman untuk masyarakat desanya.

6. Pada aspek ekonomi, Desa Margototo dan Desa Margosari diharapkan memngembangkan usaha BUMDes dengan memberikan modal atau pendampingan kepada BUMDes untuk mengembangkan usaha yang menguntungkan desa dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif.* Syakir Media Press.

Ambiyar, and Muhardika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program.* Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo tahun 2017.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung TImur tahun 2023.*

Fidarina, Nuzzila Rizki, and Suci Megawati. 2022 .Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*. Vol.10.No.4:1283-1292

Handoyo, Eko. 2012. *Kabijakan Publik*.Semarang: Widya karya.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Kalangan: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Indonesia Fokus Mencapai Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai. Available at: https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/VnCpopT3G7W3x9E2UWh2vP9jqkmjTWWNUzCLRCrJ.pdf Diakses pada 03 Oktober 2023.

Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs* Desa*: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kessa, Wahyudin. 2015. *Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa.*Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kusumastuti, A., and Khoiron, A. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif.* Syakir Madia Press, 55-282.

Linggarwati, Tundjung, Agus Haryanto, and Renny Miryanti Arief Bakhtiar Darmawan. 2022. Implementasi *SDGs* dI Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*. Vol.11. No. 1.

Malay, Jifa Hang, and Dadang Mashur. 2023. Analisis Pembangunan Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.9 No.10: 281-290.

Nawir, Adi, Syamsuddin Syamsuddin, and Jusniaty Jusniaty. 2022. Penerapan Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *DEMOKRASI.* Vol.2 No.1: 1-18.

Notoatmodjo. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka cipta.

Mustari, Nuryanti. 2015. *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Leutikaprio.

Putri, Inkana. 2023. Mendes PDTT: SDGs Desa Sumbang Optimisme bagi Negara Asia Pasifik.detiknews. Available at: https://news.detik.com/berita/d-6640515/mendes-pdtt-*SDGs*-desa-sumbang optimisme-bagi-negara-asia-pasifik Diakses pada 03 Oktober 2023.

Rizky, Muhammad Fardh'lu, and Dadang Mashur. 2022. Penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.8 No.15: 385-394.

Rusmiyatun, Rusmiyatun, Hesti Respatiningsih, and Adi Sucipto. 2023. Evaluasi Implementasi *SDGs* Desa Krandegan Bidang Ekonomi sebagai Desa Mandiri Tahun 2022. *UM Magelang Conference Series.*

Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa.*

Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. CAPIYA Publishing: Surabaya.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winaryati, dkk. 2021. *Model-Model Evaluasi, Aplikasi dan Kombinasinya.* Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.